

**DINAMIKA OTORITAS TRADISIONAL DAN  
DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DI KESULTANAN  
BIMA, 1946-1950**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin**

**Oleh:**

**MIA RAHMAWATI  
F061191008**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**SKRIPSI**  
**DINAMIKA OTORITAS TRADISIONAL DAN DEMOKRATISASI**  
**PEMERINTAHAN DI KESULTANAN BIMA, 1946-1950**

Disusun dan diajukan oleh:

**MIA RAHMAWATI**  
**F061191008**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 06 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



*Handwritten signature*  
**Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A**  
NIP. 196708171992031001

*Handwritten signature*  
**Dr. Ilham, S.S., M.Hum.**  
NIP. 197608272008011011

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya**  
**Universitas Hasanuddin**  
  
*Handwritten signature*  
**Prof. Dr. Akin Duli, M.A**  
NIP. 19640716 199103 1 010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah**  
**Universitas Hasanuddin**  
*Handwritten signature*  
**Dr. Ilham, S.S., M.Hum**  
NIP. 197608272008011 011

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**DINAMIKA OTORITAS TRADISIONAL DAN DEMOKRATISASI  
PEMERINTAHAN DI KESULTANAN BIMA, 1946-1950**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Oktober 2023



- |                                   |              |   |  |
|-----------------------------------|--------------|---|--|
| 1. Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.A | Ketua        | : |  |
| 2. Dr. Ilham, S.S., M.Hum         | Sekretaris   | : |  |
| 3. Dr. Nahdia Nur, M.Hum          | Penguji I    | : |  |
| 4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag  | Penguji II   | : |  |
| 5. Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.A | Konsultan I  | : |  |
| 6. Dr. Ilham, S.S., M.Hum         | Konsultan II | : |  |

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Mia Rahmawati

Nim : F061191008

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **DINAMIKA OTORITAS TRADISIONAL DAN DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DI KESULTANAN BIMA, 1946-1950**

adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 06 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Mia Rahmawati

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim ...*

*Alhamdulillah rabbil 'alaamiin.*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke jaman yang terang benerang. Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan dan kendala yang penulis alami, namun Alhamdulillah berkat Inayah dari Allah SWT dan optimisme penulis yang di dorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, hambatan dan kendala tersebut dapat dilalui. Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung penulis baik secara moral dan juga materil. Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu menyemangati, menjadi alasan penulis kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala penyertaan-Nya kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga kini penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan

dan telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa dihitung satu persatu serta kemudahan dan kesehatan selalu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ayahanda tersayang **Sumardin** dan Kakek **Mursalim**, dua laki-laki hebat yang membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis bisa berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi sebagai perwujudan atas kerja keras beliau. Terima kasih sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini. Masa-masa sulit berhasil menjadi pengalaman terbaik penulis. Terima kasih atas setiap nasihat yang mampu mendewasakan penulis, mampu menuntun penulis untuk belajar ikhlas dan menerima segala hal sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup.
3. Ibunda tercinta **Roslina** dan Nenek **Almh. Maemunah** dan **St. Aminah**, tiga perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kalian. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, selalu mendukung penulis hingga sampai detik ini.
4. Ketua Departemen Ilmu Sejarah Bapak **Dr. Ilham, S.S., M.Hum**, serta dosen-dosen Ilmu Sejarah **Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A., Dr. Bambang Sulistyono Edy P., M.S., Amrullah Amir, S.S, M.A., Ph.,D., A. Lili Evita, S.S., M.Hum, Nasihin, S.S., M.A., Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S., Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum, Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. H. Bahar Akkase Teng, Lc.P, M.Hum, Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. Ag, Dr. Nahdia Nur, M.Hum**, serta **Almh Margriet**

**Lappia Moka, S.S., M.S.** Dengan segala jerih payah dan ketulusan membimbing dan memandu perkuliahan sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk membagi ilmu serta memberikan masukan dan pengarahan yang sangat berguna. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Udji Usman S.Sos**, selaku staf di Departemen Ilmu Sejarah sangat membantu penulis dalam hal pengurusan berkas.

5. Kedua pembimbing, Bapak **Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A.**, dan Bapak **Dr. Ilham, S.S., M.Hum**, yang begitu sabar dan baik membimbing penulis dan selalu meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan dan saran-saran serta motivasi kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukurkan. Penulis sangat berterima kasih yang senantiasa memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa bimbingan beliau penulis tidak akan mengalami kesulitan yang lebih berat dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih Bapak, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
6. Seluruh keluarga besar Ayah dan Mama yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih

telah menjadi keluarga yang baik, selalu mendukung penulis hingga sampai detik ini.

7. Adik-adikku tersayang **Fikri Rahman, Quratun A'yunin Salsabila, Khurfatul Jannah** dan **St. Aisyah**, yang merupakan *support system* terbaik yang memberikan senyuman hangat dan selalu menyemangati penulis.
8. Sahabat tercinta **Yeni Anggriani, Muhammad Adityar** dan **Nadiratul Khairah** sebagai partner spesial, terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit. Terima kasih selalu memberikan dukungan positif menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya mendukung atau pun menghibur dalam kesedihan dan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih yang menjadi impian penulis.
9. Teman-teman penulis yang terbaik yang selalu ada dari maba sampai sekarang Sejarawan Muda: **Widya Nur Aqza, Destri Lola, Nurhalisa, Selvi Antarini, Alga Wahyu Ramadhan, Rudianto, Muhammad Amin** dan **Muhammad Rijal**. Terima kasih atas setiap dukungan, motivasi dan semangat serta selalu bersama dalam senang atau pun susah. Kehadiran kalian sangatlah berarti selama perkuliahan.
10. Partner tersetia **Baso Mappangara** dan **Fitrah Nur Akbar** yang setia menemani dan selalu mendukung selama perkuliahan, yang banyak membantu dan saling mendukung dalam penulisan proposal maupun skripsi, memberi semangat sehingga bisa melewati bersama.

11. Teman-teman Ilmu Sejarah Angkatan 2019 Universitas Hasanuddin.  
Teman seperjuangan dalam menyelesaikan Pendidikan S1. Suka duka telah kita lewati bersama terima kasih telah kebersamai.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, dukungan, motivasi, dorongan, kritik, saran, kerjasama dan doanya yang telah diberikan kepada penulis.
13. Terakhir teruntuk diri sendiri. Terima kasih sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih kepada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya, kepada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri sendiri, kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata, penulis menyadari tanpa Ridho dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'alamin.*

Makassar, 21 Juli 2023

Mia Rahmawati

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMBUT.....                                       |           |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                   | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                 | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                  | iii       |
| KATA PENGANTAR.....                                       | iv        |
| DAFTAR ISI.....   | ix        |
| DAFTAR ISTILAH .....                                      | xi        |
| DAFTAR SINGKATAN.....                                     | xii       |
| DAFTAR GAMBAR.....  | xiii      |
| ABSTRAK .....   | xiv       |
| ABSTRACT .....  | xv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                 | 1         |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                | 6         |
| 1.3. Batasan Masalah.....                                 | 7         |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....                               | 10        |
| 1.5. Manfaat Penelitian .....                             | 10        |
| 1.6. Tinjauan Pustaka .....                               | 10        |
| 1.6.1. Penelitian yang Relevan.....                       | 10        |
| 1.6.2. Landasan Konseptual .....                          | 11        |
| 1.7. Metode Penelitian.....                               | 14        |
| 1.8. Sistematika Penulisan .....                          | 17        |
| <b>BAB II GAMBARAN GEOGRAFIS DAN DINAMIKA PENDUDUK</b>    | <b>18</b> |
| 2.1. Letak, Keadaan Geografis dan Potensi Ekonomi.....    | 18        |
| 2.2. Dinamika Penduduk dan Gambaran Dunia Pendidikan..... | 33        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB III MEMUDARNYA KEKUASAAN SULTAN DAN PARA BANGSAWAN .....</b>      | <b>46</b>  |
| 3.1. Kekuasaan dan Hak Waris Tradisional .....                           | 46         |
| 3.2. Memudarnya Kekuasaan Sultan dan Para Bangsawan .....                | 62         |
| 3.3. Menyongsong Era Baru di Panggung NKRI.....                          | 67         |
| <br>   |            |
| <b>BAB IV PEMERINTAHAN KESULTANAN DAN ARAH BARU POLITIK NEGARA .....</b> | <b>72</b>  |
| 4.1. Situasi Politik Pasca Deklarasi.....                                | 72         |
| 4.2. Melemahnya Dukungan Terhadap Sultan.....                            | 77         |
| 4.3 Mereka yang Bertahan dan yang Hilang dari Panggung Kekuasaan .....   | 86         |
| <br>   |            |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>105</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....  | 105        |
| <br>   |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>107</b> |
| <br>   |            |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>112</b> |

## DAFTAR ISTILAH

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Asi</i> (bahasa Bima)             | : Istana   |
| <i>Dou</i> (bahasa Bima)             | : Orang  |
| <i>Dana</i> (bahasa Bima)            | : Tanah dalam pengertian wilayah   |
| <i>Dumu</i> (bahasa Bima)            | : Pucuk  |
| <i>Distrik</i> (bahasa Belanda)      | : Wilayah administratif pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda setingkat Kecamatan  |
| <i>Gelarang</i> (bahasa Bima)        | : Kepala Desa  |
| <i>Jeneli</i> (bahasa Bima)          | : Camat  |
| <i>Londo Sangaji</i> (bahasa Bima)   | : Keturunan Raja   |
| <i>Landschap</i> (bahasa Belanda)    | : Wilayah administratif (setingkat distrik) pada masa pemerintahan kolonial Belanda. |
| <i>Mangaji Karo'a"</i> (bahasa Bima) | : Mengaji Al-Qur'an  |
| <i>Nggahi</i> (bahasa Bima)          | : Bahasa   |
| <i>Ncuhi</i> (bahasa Bima)           | : Pemimpin kelompok masyarakat pada masa sebelum Kerajaan terbentuk                  |
| <i>Tureli</i> (bahasa Bima)          | : Mentri   |
| <i>Sappanhout</i> (bahasa Inggris)   | : Kayu Sapan   |

## DAFTAR SINGKATAN

|          |   |
|----------|---|
| AKB      | : Arsip Kerajaan Bima   |
| AMSB     | : Arsip Museum Samparaja Bima   |
| ANRI     | : Arsip Nasional Republik Indonesia   |
| API      | : Angkatan Pemuda Indonesia   |
| DRPS     | : Dewan Raja-raja Pulau Sumbawa   |
| DPS      | : Dewan Pulau Sumbawa   |
| FPS      | : Federasi Pulau Sumbawa  |
| IQAM     | : Ikatan Qaum Muslimin  |
| KNIP     | : Komite Nasional Indonesia Pusat   |
| KNID     | : Komite Nasional Indonesia Daerah  |
| KNIL     | : <i>Koninklijk Nederlandsch-Indisch</i> (Tentara Kerajaan Hindia Belanda)          |
| MAP-IQAM | : Majelis Angkatan Pemuda Ikatan Qaum Muslimin                                      |
| NICA     | : <i>Nederlands-Indies Civil Administration</i> (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) |
| NIT      | : Negara Indonesia Timur  |
| NKRI     | : Negara Kesatuan Republik Indonesia  |
| PRIT     | : Persatuan Rakyat Indonesia Tente  |
| RIS      | : Republik Indonesia Serikat  |
| TKR      | : Tentara Keamanan Rakyat   |
| DI/TII   | : Darul Islam/Tentara Islam Indonesia   |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Peta Topografi Bima Tahun 1932 .....   | 29 |
| Gambar 2.2 Siswa Sekolah HIS di Raba Bima, Tahun 1934.....  | 43 |
| Gambar 4.1 Sultan Muhammad Salahuddin Bersama Permainisuri Sitti Aisyah<br>Menyambut Kedatangan Presiden Soekarno di Pelabuhan Bima<br>pada Tanggal 3 November 1950 ..... | 98 |
| Gambar 4.2 Presiden Soekarno dan Sultan Muhammad Salahuddin di Istana Bima<br>pada 4 November 1950 .....  | 99 |

## **ABSTRAK**

**Mia Rahmawati, Nomor Pokok F061191008, dengan judul “Dinamika Otoritas Tradisional dan Demokratisasi Pemerintahan di Kesultanan Bima, 1946-1950”, dibimbing oleh Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A dan Dr. Ilham, S.S., M. Hum**

Penelitian ini secara umum menjelaskan mengenai dinamika otoritas tradisional dan demokratisasi pemerintahan di Kesultanan Bima, 1946-1950. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab memudarnya kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin dan para bangsawan, dan mengetahui bagaimana munculnya gagasan demokratisasi pemerintahan dan dinamika politik yang ikut mewarnai perjalanan Kesultanan Bima tahun 1946-1950. Karya ini disusun menggunakan metode Sejarah berupa sumber primer berupa arsip-arsip mengenai Kesultanan Bima. Selain itu juga menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan disertasi. Kesultanan Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kesultanan Bima mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui wilayah kedaulatannya sebagai bagian dari daerah Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kesultanan Bima menjadi salah satu pelopor dalam usaha kemerdekaan di Indonesia Timur, terutama mewakili pulau Sumbawa, yang memiliki tiga kerajaan yang masih berkuasa dimana sumber legitimasi tradisional berada di tangan Sultan. Selain itu, periode 1946 hingga 1950 Kesultanan Bima mencari identitas baru dalam politik baru, sistem kekuasaan tradisional harus beradaptasi dengan perkembangan menuju demokratisasi pemerintahan guna mengakomodasi harapan bersama untuk demokratisasi pemerintahan. Tahun 1946-1950 ialah upaya menunjukkan haluan politik bernegara sekaligus memulihkan otoritas Sultan Muhammad Salahuddin.

**Kata Kunci: Kesultanan, Bima, Otoritas, Tradisional, Demokratisasi.**

## **ABSTRACT**

**Mia Rahmawati, Principal Number F061191008, with the title "Dynamics of Traditional Authority and Democratization of Government in the Bima Sultanate, 1946-1950", supervised by Dr. Muslimin AR. Effendy, M.A and Dr. Ilham, S.S., M. Hum**

This research generally explains the dynamics of traditional authority and democratization of government in the Bima Sultanate, 1946-1950. This research aims to determine the factors causing the waning of the power of Sultan Muhammad Salahuddin and the nobles, and to find out how the emergence of the idea of democratization of government and the political dynamics that influenced the journey of the Bima Sultanate in 1946-1950. This work was prepared using the historical method in the form of primary sources in the form of archives regarding the Bima Sultanate. Apart from that, it also uses secondary sources in the form of books, journals and dissertations. The Bima Sultanate is located in the eastern part of Sumbawa Island, West Nusa Tenggara. The Bima Sultanate recognized Indonesia's independence and recognized its sovereign territory as part of Indonesia. The results of this research explain that the Bima Sultanate was one of the pioneers in the efforts for independence in Eastern Indonesia, especially representing the island of Sumbawa, which has three kingdoms that still rule where the source of traditional legitimacy is in the hands of the Sultan. In addition, in the period from 1946 to 1950, the Bima Sultanate sought a new identity in new politics. The traditional system of power had to adapt to developments towards democratization of government in order to accommodate shared hopes for democratization of government. The years 1946-1950 were an effort to show the country's political direction and at the same time restore the authority of Sultan Muhammad Salahuddin.

**Keywords: Sultanate, Bima, Authority, Traditional, Democratization.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bima menjadi arena penting perebutan kekuasaan di Pulau Sumbawa. Pengaruhnya terhadap perkembangan politik daerah bergantung pada kemampuan pemimpin dan rakyatnya, kemahirannya menggunakan teknologi transportasi laut yang dianggap modern pada saat itu, jumlah penduduknya yang besar, wilayahnya yang luas, serta kekuatan militer dan diplomasinya. Bima menjalin hubungan dengan Dompu dan Sumbawa melalui lembaga perkawinan antar bangsawan. Kekuasaan Sultan dilaksanakan atas dasar kekerabatan. Bima menghadapi tantangan dan ancaman dari luar dalam perkembangannya, seperti Belanda (1908-1942), Jepang (1942-1945), NICA (*Nederlands-Indies Civil Administration*, Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, 1946), Negara Indonesia Timur (NIT) (1946-1950), Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) (1950-1965), dan dinamika internal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terdengar lambat di wilayah Bima. Berita kemerdekaan Indonesia baru diketahui pada tanggal 4 September 1945, setelah para siswa Sekolah Guru Singaraja-Bali dan delegasi Gubernur Sunda Kecil Ida Bagus Putu Manuaba menyampaikannya kepada Sultan Bima.<sup>1</sup> Lahirnya kemerdekaan Indonesia telah menyuntikan kekuatan baru bagi rakyat yang terus mempertahankan kemerdekaannya. Untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo*. (Jakarta: Harapan Masa PGRI, 1995), hlm. 332.

meningkatkan kekuatan rakyat, pemerintah Kesultanan mendirikan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Bima pada tanggal 5 September 1945 sebagai bagian dari KNI Pusat.

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) menimbulkan dilema baru bagi pihak istana. Sultan Muhammad Salahuddin menganggap bahwa KNID telah menghilangkan perannya di panggung politik dan mereformasi pemerintahan dengan memasukan sistem ketatanegaraan baru yang mengurangi kepentingan para bangsawan. Kecemasan akan tersingkir dari struktur baru yang dibangun menjadi mimpi buruk bagi keluarga istana, terutama mereka yang tidak memiliki basis pendidikan yang kuat. Karena itu, pengangkatan Ishaka Abdullah sebagai Ketua KNID memunculkan berbagai lontaran kritik dan tuduhan-tuduhan sebagai sosok revolusioner yang akan membongkar struktur dan bangunan pemerintahan lama yang feodalistik dan konservatif. Kritik-kritik demikian merupakan pantulan cermin persaingan antar elite dalam kepemimpinan lokal.

Pada tanggal 9 Desember 1945 Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) wilayah Bima-Dompu yang dipimpin Abdul Kahir menahan ketua dan anggota KNID Ishaka Abdullah, M. Amin Saleh dan M. Ilyas di Markas TKR Cenggu, Belo. Mereka dituduh melakukan persekongkolan untuk menjatuhkan pemerintah, berencana mengubah pranata politik Kesultanan dengan menyusun struktur birokrasi modern yang sangat bertentangan dengan sistem tradisional yang sedang berjalan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Arsip Keluarga M. Saleh Bakry. *Riwayat Hidup dan Perjuangan M. Saleh Bakry 1932-1950*. (Bima: naskah ketikan, 1984).

Penahanan itu menimbulkan kemarahan di kalangan pemuda dan anggota laskar Angkatan Pemuda Indonesia (API). M. Thajib Abdullah segera menghadap Sultan Muhammad Salahuddin untuk membicarakan masalah tersebut. Sultan Muhammad Salahuddin menerima usulan M. Thajib Abdullah untuk segera mencari jalan keluar atas insiden itu dengan menugaskan Idris M. Jafar untuk bernegosiasi dengan pimpinan TKR. Pimpinan KNID berhasil meyakinkan pimpinan TKR bahwa komite yang dibentuk merupakan instruksi pemerintah pusat untuk menegakkan kewibawaan negara, menjaga soliditas dan keutuhan perjuangan. Dengan alasan-alasan ini telah meluluhkan sikap keras Abdul Kahir sehingga mereka dapat dibebaskan.<sup>3</sup> Penahanan pengurus KNID sebagian berasal dari kekhawatiran Abdul Kahir terhadap semangat perubahan dan demokratisasi yang diusung tokoh-tokoh itu dalam pemerintahan.

Untuk mengurangi ketegangan dan menghilangkan kecurigaan kelompok Abdul Kahir, pada 12 Desember 1945 dibentuk pengurus baru KNID dengan mengangkat A.D. Talu sebagai ketua, dan Muhammad Hasan dan R. Lantip sebagai anggota. Tugas pertama mereka adalah mengadakan rapat-rapat umum dengan utusan pemerintah pusat dalam rangka konsolidasi perjuangan.<sup>4</sup>

Tidak adanya kesepakatan tentang distribusi kekuasaan mempertajam pertentangan mengenai siapa yang pantas mengisi jabatan kepala daerah pasca berakhirnya periode Kesultanan. Pertentangan itu berlangsung antar kelompok,

---

<sup>3</sup> Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana* (1995), hlm. 356.

<sup>4</sup> Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana ...*(1995), hlm. 356-357.

golongan bahkan antar perorangan yang mempunyai berbagai pandangan tentang cara mengatasi kekurangan sistem politik. Pusat persoalan adalah bagaimana mengakomodasi atau menyingkirkan sisa-sisa kekuatan feodal yang terus menuntut pengakuan sebagai pihak yang sah mewarisi kekuasaan.

Sultan Muhammad Salahuddin merasa sulit untuk menjalankan pemerintahan tanpa bantuan elit bangsawan dan kaum tradisional yang memiliki pengaruh kuat di semua lapisan masyarakat. Banyak elit membangun kembali persekutuan mereka dengan Sultan Muhammad Salahuddin untuk keuntungan politik dan ekonomi. Sultan Muhammad Salahuddin bergantung pada bangsawan setempat. Justru karena dukungan kekuatan luar yang kuat, posisinya dapat bertahan. Kesultanan adalah lembaga pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan bersama dan menunjukkan ciri-ciri negara.

Kehadiran partai politik dalam dewan membawa iklim baru bagi terwujudnya pranata demokrasi, bahwa rakyat secara bebas dan langsung dapat memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan kepentingannya. Kegairahan berdemokrasi ini, antara lain didorong oleh keterbukaan pemerintah mengakomodasi tuntutan rakyat untuk perubahan, baik pada struktur lembaga Kesultanan maupun dalam sistem tata kelola pemerintahan. Sistem pengelolaan negara tidak lagi didasarkan pada kepentingan politik segelintir elite yang terus memperjuangkan “hak waris” terhadap negara melainkan terbuka bagi partisipasi publik. Reformasi yang mengubah bangunan politik negara dari feodalisme-otoritarianisme ke arah yang lebih demokratis telah dimulai. Proses yang relatif lambat ini menimbulkan dampak yang serius bagi eksistensi NKRI. Keadaan ini

telah mengubah sistem politik tradisional menjadi kuasa politik atas dasar prestasi, dari suatu masyarakat non-egaliter tertutup menjadi egaliter terbuka. Sultan Muhammad Salahuddin akhirnya dapat menerima kenyataan dihapuskannya kuasa politik mereka setelah proklamasi dan ikut ke dalam integrasi nasional.<sup>5</sup>

Sultan Muhammad Salahuddin dan para bangsawan penguasa reaktif dalam menyikapi isu-isu sekitar demokratisasi pemerintahan karena menganggap bahwa gagasan pembaharuan yang diusung elite baru yang sebagian besar adalah kaum terpelajar, adalah ancaman bagi kelangsungan kekuasaan Kesultanan. Dalam krisis politik tahun pertama pasca proklamasi kemerdekaan, janji-janji perbaikan tak lagi cukup meyakinkan untuk membatasi dukungan elite politik terhadap proses pembentukan negara baru, Indonesia. Pada tahun 1946, timbul perselisihan antara Sultan Muhammad Salahuddin dan pembantunya dalam menanggapi kehadiran NICA. Tahun ini menjadi lebih sulit karena Sultan Muhammad Salahuddin mengambil arah politik baru dalam sistem ketatanegaraan, bergabung dengan rezim Negara Indonesia Timur yang diciptakan oleh Belanda. Situasi ini berlanjut hingga tahun 1950. Tahun 1950-an adalah waktu untuk mempertaruhkan kredibilitas, karena pendukung republik semakin menekan federalisme untuk segera dihapus dari praktik bernegara.

---

<sup>5</sup> Helius Syamsuddin, "Perubahan Politik dan Sosial di Pulau Sumbawa: Kesultanan Sumbawa dan Kesultanan Bima (1815-1950)", Nana Supriatna dan Erlina Wiyanarti (editor), *Sejarah dalam Keberagaman* (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI-Rizqy Offset, 2008), hlm. 245.

Maka dapat dimengerti bahwa pilihan untuk berkecimpung dalam sistem ketatanegaraan federal di tahun 1946-1950 merupakan upaya menunjukkan haluan politik bernegara sekaligus memulihkan otoritas Sultan Muhammad Salahuddin. Meskipun sistem federal ini berumur pendek namun, keterlibatan Sultan Muhammad Salahuddin dalam kancah NIT telah melahirkan sikap pragmatis dalam kehidupan bernegara.

Sementara Abdul Kahir yang sudah dipersiapkan sejak awal untuk meneruskan kepemimpinannya tidak lagi memiliki kesempatan yang cukup untuk mencoba mempertahankan hak waris Kesultanan karena tuntutan ke arah demokratisasi yang berjalan sangat dinamis di tahun 1950-an. Ia bisa bertahan karena kewibawaan dan pancaran kharismatik yang dimilikinya, dukungan massa pedesaan serta kemampuan mempersatukan semua elemen yang terpisahkan karena politik aliran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari gambaran diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi penyebab memudarnya kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin dan para bangsawan? Dan
2. Bagaimana munculnya gagasan demokratisasi pemerintahan dan dinamika politik yang ikut mewarnai perjalanan Kesultanan pada tahun 1946-1950.

### 1.3 Batasan Masalah

Demokratisasi pemerintahan yang menjadi keinginan bersama sebagian besar anggota Dewan Pulau Sumbawa (lembaga perwakilan bentukan Negara Indonesia Timur) adalah sebuah wujud penghargaan dewan terhadap tuntutan publik akan terjadinya perubahan struktur pemerintahan menyongsong zaman baru yang berkedaulatan rakyat. Arah perubahan tersebut mempengaruhi pula motivasi individu-individu anggota Dewan Pulau Sumbawa (DPS) terhadap masa depan mereka. Karena itu, ideologi baru yang bertumpu pada keyakinan munculnya struktur pemerintahan baru yang dijalankan oleh “orang-orang baru” dengan basis partai politik yang terorganisasi secara modern akan mampu menghapus pencitraan lama yang bertumpu pada figur Sultan Muhammad Salahuddin, seorang pemimpin konservatif yang santun.

Pembentukan dewan dapat diletakan dalam kerangka demokratisasi lokal melalui demokrasi perwakilan yang rasional dan independen. Namun, sistem demokrasi perwakilan menurut Frank Bealey, menciptakan jarak psikologis dan sosial antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.<sup>6</sup> Di sinilah kekuasaan mengalami berbagai perubahan bentuk. Kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin bersama kaum bangsawan perlahan-lahan mulai berkurang. Mereka, para bangsawan tidak bisa lagi berlindung dibalik dalil “suara Tuhan adalah suara rakyat” yang dianggap menampakkan diri dalam pribadi dan tindakan seorang

---

<sup>6</sup> Frank Bealey, *The Blackwell Dictionary of Political Science*. (UK: The Blackwell Publishers, 2000), hlm. 285.

Sultan, tetapi harus menegakan prinsip-prinsip berdemokrasi yang mengakui dalil “suara rakyat adalah suara Tuhan”.<sup>7</sup>

Dalam studi ini, ada dua dimensi yang menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam kajian sejarah. Kedua aspek tersebut adalah masalah waktu (*time*) atau kronologi, dan masalah ruang (*space*) atau lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Kedua konteks waktu dan tempat ini akan diulas secara singkat berikut ini. Kajian ini dimulai dari tahun 1946 ketika Sultan Bima Muhammad Salahuddin mulai tertarik bahkan kemudian ikut mengambil bagian penting dalam proses pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT). Keterlibatan Sultan Muhammad Salahuddin memperjuangkan pendirian NIT ini ikut berpengaruh pula terhadap haluan politik atau pandangan umum pihak Kesultanan sebagai sebuah kesatuan pemerintahan yang pada awalnya bercorak tradisional yang mengalami transisi ke dalam era baru, negara modern yang berasaskan pada demokrasi dan persamaan hak. Sejak tahun ini pula (1946) kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin mulai mendapat tantangan dari tokoh-tokoh yang mendapat dukungan luas dari rakyat yang pro republik. Misalnya, himbuan Sultan Muhammad Salahuddin untuk menerima kehadiran NICA justru mendapat tantangan dari para tokoh dan rakyat Bima dengan memperlihatkan sikap yang berlawanan dengan Sultan Muhammad Salahuddin. Para tokoh tersebut menolak kehadiran NICA dan pada sisi yang lain rakyat menyatakan kesiapannya menjaga keamanan Kesultanan dan tidak

---

<sup>7</sup> Ignas Kleden, *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Agustus, 2001), hlm. xx.

bertanggung jawab atas keselamatan pasukan asing.<sup>8</sup> Meskipun pernyataan kesanggupan dari para tokoh dan kaum muda ini untuk menjaga keamanan mustahil dapat diwujudkan karena kondisi peralatan dan senjata serta suasana psikologis masyarakat atau organisasi perjuangan yang masih berlandung di bawah pengaruh Sultan Muhammad Salahuddin. Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda terus berkumandang. Aksi demonstrasi yang digalang tokoh-tokoh republik terjadi hampir di seluruh sudut kota Bima.

Studi ini berakhir di tahun 1950 ketika pemerintahan Kesultanan mengakhiri masa tugasnya dan berganti menjadi pemerintahan yang berbentuk swapraja yang dipimpin oleh elite terpelajar yang bukan dari kelompok bangsawan bernama Muhammad Hasan. Dinamika sejarah politik dan pemerintahan sepanjang tahun 1946-1950 itulah yang hendak dikaji dalam studi ini.

Batasan spasial merupakan batasan wilayah atau lokasi yang akan dikaji dalam penelitian sejarah. Dalam tulisan ini batasan spasialnya adalah wilayah Kesultanan Bima yang dalam konteks kekinian wilayah tersebut sudah terbagi dalam beberapa wilayah administrasi pemerintahan modern, yaitu Kabupaten Bima, dan Kota Bima yang keduanya terletak di bagian timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lokasi penelitian ini dipilih karena Kesultanan Bima menjadi salah satu pelopor dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia Timur, terutama di Pulau Sumbawa.

---

<sup>8</sup> Markas Cabang Legiun Veteran RI Kabupaten Bima. *Perjalanan Sejarah Perjuangan Kelasjkan di Daerah Bima dan Dompu*. (Bima: tanpa tahun, naskah ketikan dan tulisan tangan).

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan faktor penyebab memudarnya kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin dan para bangsawan, dan
2. Menjelaskan munculnya gagasan demokratisasi pemerintahan dan dinamika politik yang ikut mewarnai perjalanan Kesultanan pada tahun 1946-1950.

#### **1.5 Manfaat penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Untuk melakukan penelitian sejarah lebih lanjut dengan mengkaji peristiwa pada tingkat lokal di daerah yang selama ini mungkin terabaikan dalam sejarah Indonesia.
2. Untuk mengetahui karakter tokoh dan kecenderungan garis perjuangan sebuah pemerintahan yang bercorak Kesultanan secara efektif dengan menggunakan metode keilmuan yang ada.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

#### **1.6 Tinjauan Pustaka**

##### **1.6.1 Penelitian Yang Relevan**

Referensi yang menjadi petunjuk awal tentang sejarah Bima adalah buku yang ditulis oleh sejarawan lokal Bima, yaitu M. Hilir Ismail. Beliau menulis buku yang diterbitkan tahun 2004 berjudul *Peran Kesultanan Bima dalam Sejarah Nusantara*. dan *Tokoh-tokoh Sejarah Lokal Bima. Zaman Perintis Kemerdekaan-Zaman Revolusi Kemerdekaan (1611-1950)*. Ada pula buku sejarah Bima yang disunting dan diberi pengantar yang sangat kaya dengan sumber-sumber baru oleh Henri Chambert-Loir dan Siti Mariam Salahuddin. Buku tersebut berjudul *Bo Sangaji Kai: Catatan Kerajaan Bima*. Buku ini ditulis berdasarkan pada naskah Melayu-Bima yang beberapa naskah diantaranya dimiliki secara pribadi oleh beberapa bangsawan Bima. Mereka membaca ulang, mengedit, dan memberi catatan panjang atas hasil kerjanya yang kemudian beredar luas dan menjadi bacaan penting untuk mengkaji sejarah Bima. Selain itu, Henri-Chambert-Loir telah menulis pula beberapa buku dan artikel tentang sejarah Bima. Di antaranya yang dapat disebutkan di sini adalah; *Kerajaan Bima Dalam Sastra dan Sejarah*; *Syair Kerajaan Bima*, dan *Iman dan Diplomasi*. Buku ini menggambarkan sejarah Bima dalam memandang dunia dari perspektif orang Bima, dan peristiwa di luar lingkungan yang mempengaruhinya. Hampir semua pelaku sejarah diperankan oleh para bangsawan, elite-elite politik yang berpengaruh, pejabat-pejabat istana. Tidak semua yang diceritakan dalam *bo* dianggap mewakili zamannya, karena itu perlu mengacu ke sumber-sumber lain semasa untuk mendapatkan gambaran utuh tentang suatu peristiwa.

### **1.6.2 Landasan Konseptual**

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diperlukan kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut. Definisi mengenai otoritas, demokratisasi diuraikan pada bagian ini.

Ada beberapa unsur yang ditemukan dalam gejala politik yaitu kepemimpinan, otoritas, ideologi, organisasi, dan lainnya. Berdasarkan teori Max Weber kepemimpinan dan otoritas dibagi menjadi tiga, yaitu otoritas legal-rasional, otoritas tradisional dan otoritas kharismatik.

Otoritas rasional adalah otoritas yang mendapatkan legitimasi atas legalitas kekuasaan atau aturan yang telah disepakati. Menurut Max Weber, otoritas legal-rasional hanya akan terjadi di dunia modern yang berdasarkan pada aturan rasional yang ditetapkan secara formal. Berkaitan dengan kewenangan nalar hukum, pilihan pemimpin berhak atas posisi otoritas diatur dalam peraturan sah dan disetujui birokrasi sekaligus bawahan atau subyek pemimpin karena status sosialnya dipaksakan oleh hukum.<sup>9</sup>

Otoritas tradisional, menurut Max Weber adalah otoritas individu karena pemimpin itu terkait dengan pemimpin sebelum pengikutnya, pengikutnya sudah punya acuan untuk mengikuti jejak pemimpin secara otomatis dan mematuhi otoritas dari pemimpin mereka. Otoritas murni tradisional bersifat konservatif, mengakar dan memperkuat sikap dan perilaku tradisional. Namun, kewenangan tradisional ini juga dapat disebut “irasional” karena kewenangannya tidak memiliki aturan formal, prosedur yang jelas, dan preseden hukum. Pada masa pemerintahannya, pemimpin bebas menjalankan perintah asalkan menganut tradisi

---

<sup>9</sup> SF. Marbun, “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas,” *Jurnal Hukum*, 6:3, hlm. 34.

yang berlaku. Dalam analisisnya tentang otoritas tradisional, Weber juga menyinggung berbagai "birokrasi" yang dijalankan.<sup>10</sup>

Dalam masyarakat Kesultanan Bima, otoritas tradisional dapat dilihat pada sumber legitimasi tradisional yang ada pada sultan. Kedudukan sultan dapat diwariskan melalui garis laki-laki, sekalipun sultan belum dewasa ketika naik tahta, ibunya tidak dapat tampil sebagai sultan atau raja. Seorang sultan dipilih di antara para anggota keluarga Kesultanan. Begitu seorang sultan dewasa, statusnya dikukuhkan oleh pemerintah, tetapi secara tradisional seorang sultan hanya dapat memerintah jika dia menerima mahkota.

Tradisional dapat diartikan sebagai sistem yang mempertimbangkan dan meyakini legitimasi berdasarkan kesucian tatanan dan kekuasaan berasal dari masa lalu. Mereka yang menjalankan kekuasaan ini diangkat menurut aturan yang diwariskan melalui tradisi. Objek kepatuhan yang demikian adalah otoritas pribadinya berdasarkan posisi tradisionalnya.

Demokratisasi adalah proses pergeseran struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis. Demokratisasi adalah proses pluralisasi kekuasaan untuk menghilangkan kesenjangan hak-hak sipil dan politik dan sebagai acuan bersama. Demokrasi adalah cara mempopulerkan tugas dan fungsi negara melalui sarana kekuasaan sosial formal dan informal. Rakyat memiliki dan mengilhami demokrasi sedemikian rupa sehingga mampu bertahan menghadapi serangan-serangan "anti-demokrasi". Situasi ini sangat tergantung pada kemampuan orang tersebut untuk mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> SF. Marbun, "Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan"... hlm. 35.

berbicara tentang demokratisasi suatu negara atau daerah sangat bergantung pada sistem politik yang dianut.<sup>11</sup>

## **1.7 Metode Penelitian**

Dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah serta pertanyaan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang dimulai dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi).

### **a. Pemilihan Topik**

Memilih topik merupakan langkah awal dalam penulisan sejarah. Dengan ditemukannya topik maka penulis dapat menetapkan batasan spasial dan temporal yang akan diteliti. Penentuan topik dilakukan berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dengan adanya kedekatan emosional maupun intelektual maka dapat mempermudah peneliti dalam menulis serta memperoleh sumber yang dibutuhkan.

### **b. Pengumpulan Sumber**

Setelah memilih topik, langkah kedua yang dilakukan adalah pengumpulan sumber baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Pengumpulan sumber berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti yang ingin menulis mengenai Dinamika Otoritas

---

<sup>11</sup> Syamsudin Haris, “*Desentralisasi dan Otonomi Daerah*”: *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), hlm. 45.

Tradisional dan Demokratisasi Pemerintahan di Kesultanan Bima, 1946-1950, sehingga perlu mencari sumber-sumber (primer dan sekunder) yang berkaitan dengan judul tersebut, seperti buku-buku, jurnal, serta arsip. Penulis mengumpulkan sumber sekunder berupa buku-buku. Sebagai tambahan penulis juga melakukan penelusuran dan akses di internet.

Sumber-sumber yang digunakan mengandalkan pada beberapa jenis bahan dengan lebih mengutamakan sumber primer yang tersedia di beberapa tempat. Sumber primer tidak cukup untuk mengisi semua ruang analisis dari beberapa aspek yang dibahas, karena itu diperlukan bantuan dari jenis bahan yang lain, yaitu sumber sekunder. Seperti halnya sumber primer, sumber sekunder pun harus diklasifikasi, ditelaah, dan dikritik berdasarkan asal, isi dan relevansinya dengan topik penelitian.

### **c. Kritik Sumber**

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sumber untuk mengetahui keabsahan sumber yang diperoleh. Pada tahap ini dikenal dua kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keaslian sumber, apakah sumber itu valid, asli atau tiruan. Kritik intern bertujuan untuk menguji kredibilitas dari sumber sejarah. Untuk menentukan keaslian data atau sumber maka kita dapat membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dengan masalah yang sama dengan sumber yang berbeda. Kritik ekstern dan intern berfungsi untuk menyaring data dari sumber-sumber yang diperoleh. Pentingnya kritik sumber dilakukan untuk mengubah “sumber sejarah”

menjadi “bukti” dengan standar interpretasi dan penjelasan dalam penulisannya.

**d. Interpretasi**

Pada bagian ini penulis menganalisis fakta-fakta atau sumber-sumber sejarah yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan mengenai inti dari fakta-fakta sejarah tersebut. Melalui interpretasi maka hubungan kausalitas antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya dapat terbangun. Selain itu interpretasi juga bermaksud untuk mengetahui mana yang masuk dalam klasifikasi sumber primer dan sekunder. Melalui interpretasi maka akan menghasilkan pandangan yang baru terhadap sejarah tersebut, atau sudut pandang yang baru dari penelitian sebelumnya.

**e. Penulisan Sejarah (Historiografi)**

Penulisan sejarah merupakan puncak atau tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dirangkaikan dalam narasi sejarah dan deskriptif. Penelitian ini berfokus mengenai Kesultanan Bima sehingga dalam penulisannya menyajikan sumber-sumber sejarah baik primer maupun sekunder, kemudian sumber-sumber tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif dan narasi sejarah.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Dinamika Otoritas Tradisional dan Demokratisasi Pemerintahan di Kesultanan Bima, 1946-1950” ini terbagi dalam lima bab yang dibuat secara sistematis, sebagai berikut:

**Bab I**, berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II**, akan membahas secara umum mengenai gambaran geografis dan dinamika penduduk.

**Bab III**, akan membahas mengenai kekuasaan dan otoritas tradisional.

**Bab IV**, penulis akan membahas tentang bagaimana munculnya gagasan, dan pelaksanaan demokratisasi pemerintahan di Kesultanan Bima.

**Bab V**, merupakan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang telah diajukan sekaligus penutup dari penelitian yang sudah terangkum di bab terakhir ini.